



Kemendikdasmen
BPMP Provinsi Bengkulu

PROFIL BPMP BENGKULU

2026

WA ULT +62 851-5051-3284

Jl. Zainul Arifin No.2, Kel. Padang Nangka,
Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu
38224, Indonesia

www..bpmpbengkulu.kemendikdasmen.go.id

@bpmp.bengkulu



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Profil Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bengkulu ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai wujud komitmen keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan amanah penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Bengkulu.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah BPMP Provinsi Bengkulu terus bergerak dinamis mengawal berbagai program prioritas nasional. Dokumen profil ini merangkum sejarah transformasi kelembagaan, landasan hukum operasional, struktur tata kelola 5 tim kerja operasional, komposisi sumber daya aparatur, serta pemetaan isu strategis pendidikan di wilayah Bengkulu.

Kami berharap profil ini mampu memberikan gambaran komprehensif kepada segenap pemangku kepentingan mengenai peran strategis BPMP Provinsi Bengkulu dalam mendampingi pemerintah daerah dan satuan pendidikan demi terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan bermutu.

Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif dalam penyusunan dokumen profil ini serta senantiasa mendukung tercapainya visi dan misi penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, 2026
Kepala BPMP Provinsi Bengkulu,

SABURA SOE'OED PUTRA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I: GAMBARAN UMUM & REKAM JEJAK HISTORIS	1
1.1 Kedudukan dan Wilayah Kerja	1
1.2 Rekam Jejak Transformasi Kelembagaan	1
1.3 Kepemimpinan Institusi	1
BAB II: LANDASAN HUKUM OPERASIONAL	2
2.1 Regulasi Kementerian dan Kelembagaan	2
2.2 Regulasi Akuntabilitas dan Perencanaan Pembangunan	2
BAB III: TUGAS POKOK DAN FUNGSI STRATEGIS	2
3.1 Tugas Pokok	2
3.2 Tujuh Fungsi Utama Penjaminan Mutu	2
BAB IV: STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA KERJA	3
4.1 Struktur Organisasi Formal	3
4.2 Pembagian 5 Tim Kerja Operasional	3
BAB V: PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	4
5.1 Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN)	4
5.2 Distribusi Jabatan Fungsional dan Pelaksana	4
5.3 Persebaran Kelas Jabatan Aparatur	6
BAB VI: ISU STRATEGIS DAN FOKUS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	6
6.1 Pemerataan Akses Layanan Pendidikan dan PAUD 1 Tahun	6
6.2 Kualitas Pembelajaran Berbasis Budaya Lokal	7
6.3 Kapasitas dan Distribusi Pendidik Berkelanjutan	7
6.4 Inovasi, Digitalisasi Adaptif, dan Sinergi Kemitraan	7
BAB VII: PENUTUP	7

BAB I: GAMBARAN UMUM & REKAM JEJAK HISTORIS

1.1 Kedudukan dan Wilayah Kerja

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bengkulu merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia setingkat Eselon III.a , berkedudukan di Jalan Zainul Arifin Nomor 02, Kota Bengkulu, dengan wilayah kerja yang mencakup seluruh wilayah administratif Provinsi Bengkulu. Lembaga ini berfungsi sebagai garda terdepan pengawalan kebijakan mutu pendidikan nasional di tingkat daerah, menjembatani sinergi antara kementerian dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.

1.2 Rekam Jejak Transformasi Kelembagaan

Keberadaan BPMP Provinsi Bengkulu berakar dari evolusi kelembagaan yang panjang dan adaptif terhadap arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia Indonesia:

Tahun / Periode	Nomenklatur	Dasar Regulasi & Fokus Peran
1992	Balai Penataran Guru (BPG)	Kepmendikbud No. 0240a/O/1991. Berfokus pada penataran dan pelatihan peningkatan kapasitas guru di Bengkulu.
2003–2004	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)	Kepmenpen No. 087/O/2003. Bertransformasi fokus pada pemetaan mutu pendidikan, supervisi, serta sertifikasi dan fasilitasi PTK.
2007–2016	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)	Permendiknas No. 7/2007 & Permendikbud No. 14/2015. Penguatan tata kelola UPT di bawah Ditjen Dikdasmen dan pembinaan mutu terpadu.
2022–Sekarang	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP)	Permendikbudristek No. 11/2022. Memperluas mandat penjaminan mutu mencakup PAUD, Dikdas, Dikmen, dan Pendidikan Masyarakat berbasis data.

1.3 Kepemimpinan Institusi

Sejak awal berdirinya hingga saat ini, kepemimpinan BPMP Provinsi Bengkulu telah berganti sebanyak sembilan kali. Sejak tahun 2025, institusi ini dinakhodai oleh Bapak **Sabura Soe'oed Putra, S.E., M.Si.** di bawah kepemimpinan beliau, BPMP Bengkulu meneguhkan budaya kerja kolaboratif, responsif, dan berintegritas tinggi selaras dengan core values ASN BerAKHLAK dan agenda Reformasi Birokrasi Tematik, dan terpenting juga mengedepankan aspek saling menghargai, karena pada dasarnya setiap individu pasti bermanfaat bagi invidu lainnya.

BAB II: LANDASAN HUKUM OPERASIONAL

Penyelenggaraan tata kelola, penjaminan mutu, serta akuntabilitas kinerja BPMP Provinsi Bengkulu berlandaskan pada kerangka peraturan perundang-undangan nasional yang kokoh:

2.1 Regulasi Kementerian dan Kelembagaan

Pelaksanaan kelembagaan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

2.2 Regulasi Akuntabilitas dan Perencanaan Pembangunan

Penyusunan program kerja dan evaluasi akuntabilitas berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, serta Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029.

Adapun tata kelola pelaporan SAKIP dan penjenjangan kinerja dipandu oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014, PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022.

BAB III: TUGAS POKOK DAN FUNGSI STRATEGIS

3.1 Tugas Pokok

Melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, serta pendidikan nonformal dan informal di wilayah Provinsi Bengkulu sesuai dengan arah tata kelola Kemendikdasmen berdasarkan Permendikdasmen No. 13 Tahun 2026.

3.2 Tujuh Fungsi Utama Penjaminan Mutu

Dalam merealisasikan tugas pokok tersebut, BPMP Provinsi Bengkulu menjalankan 7 (tujuh) pilar fungsi strategis:

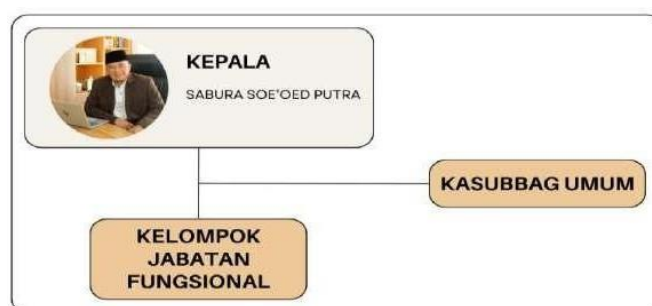
Pilar Fungsi	Deskripsi Ruang Lingkup Kerja
1. Pemetaan Mutu	Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan secara komprehensif pada jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen, dan Dikmas berbasis Rapor Pendidikan dan Asesmen Nasional.
2. Pengembangan Model	Mengembangkan inovasi dan model penjaminan serta peningkatan mutu pendidikan yang relevan dengan kebutuhan daerah.

3. Supervisi Mutu	Melaksanakan supervisi berkelanjutan terhadap pemenuhan dan peningkatan standar mutu di setiap satuan pendidikan.
4. Fasilitasi Peningkatan	Memfasilitasi peningkatan mutu pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan manajemen kelembagaan satuan pendidikan.
5. Kemitraan Strategis	Mengembangkan jejaring dan kolaborasi kemitraan bersama pemda, dinas pendidikan, LPTK, swasta, dan organisasi masyarakat.
6. Pemantauan & Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi penjaminan mutu dan program prioritas nasional.
7. Layanan Administrasi	Menyelenggarakan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, persuratan, rumah tangga, dan sistem informasi internal.

BAB IV: STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA KERJA

4.1 Struktur Organisasi Formal

Secara formal, struktur organisasi BPMP Provinsi Bengkulu terdiri atas unsur pimpinan (Kepala), unsur tata usaha pendukung (Subbagian Umum), dan unsur teknis substantif (Kelompok Jabatan Fungsional). Seluruh elemen bekerja secara terintegrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program dan akuntabilitas anggaran.



Gambar 1.2 Susunan Organisasi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu

4.2 Pembagian 5 Tim Kerja Operasional

Guna mencapai target kinerja Rencana Strategis secara lincah dan berorientasi hasil, sumber daya manusia BPMP Provinsi Bengkulu diorganisasikan ke dalam Subbag Umum dan 4 (empat) Tim Kerja operasional:



Gambar 1.3 Bagan Tim Kerja BPMP Provinsi Bengkulu

No	Tim Kerja	Fokus Urusan & Sasaran Kinerja
1	Subbagian Umum	Pengelolaan perencanaan, keuangan, tata persuratan, epegawaian, perlengkapan BMN, kehumasan, dan kerumahtanggaan.
2	Tim Kerja PAUD	Fasilitasi mutu Pendidikan Anak Usia Dini, pengawalan kebijakan Wajib Belajar 1 Tahun PAUD, dan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.
3	Tim Kerja SD	Penguatan literasi dan numerasi dasar, implementasi kurikulum, serta pendampingan mutu satuan Sekolah Dasar.
4	Tim Kerja SMP	Peningkatan mutu pembelajaran jenjang Sekolah Menengah Pertama, penguatan iklim keamanan sekolah, dan asesmen mutu berkala.
5	Tim Kerja SMA & SLB	Peningkatan mutu Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa (Pendidikan Khusus), inklusivitas layanan, serta kesiapan lulusan.

BAB V: PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

5.1 Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Berdasarkan Daftar Urut Kepegawaian (DUK) per 31 Desember 2025, total kekuatan aparatur sipil negara di BPMP Provinsi Bengkulu berjumlah 100 orang. Kekuatan pegawai terdiri dari 78 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 22 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan komposisi gender, terdapat 57 pegawai laki-laki (57%) dan 43 pegawai perempuan (43%), mencerminkan partisipasi kerja yang inklusif dan berimbang.



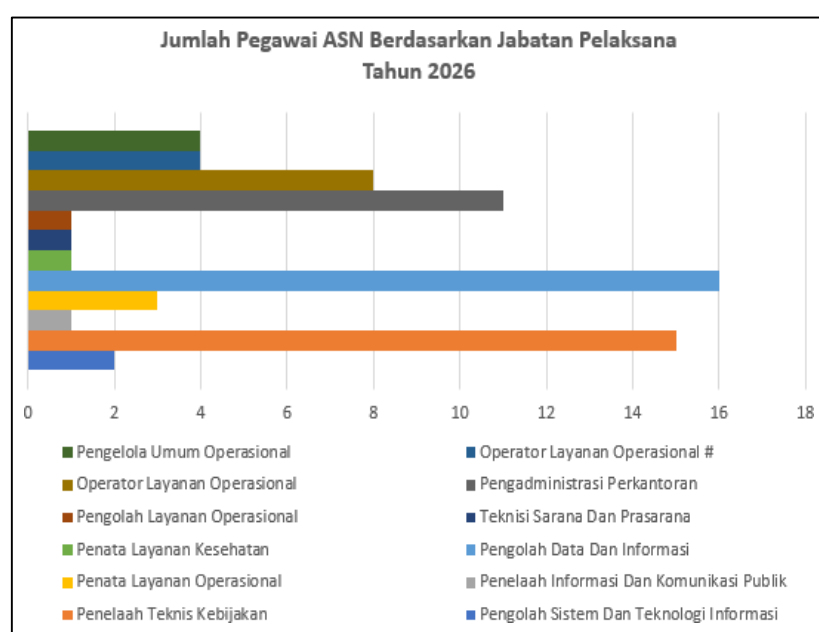
Gambar 1.1 Komposisi ASN BPMP Provinsi Bengkulu

5.2 Distribusi Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Aparatur BPMP Provinsi Bengkulu terbagi ke dalam tiga jenis jabatan utama, yaitu Jabatan Struktural (Kepala dan Kasubbag Umum), Jabatan Fungsional (JF), dan Jabatan Pelaksana (JP).



Gambar 1.4 Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2025



Gambar 1.5 Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan Pelaksana Tahun 2025

Kelompok Nomenklatur Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah & Keterangan
Widyaprada Ahli Madya	Kelas 11	17 Orang (Penjaminan Mutu Senior)
Widyaprada Ahli Muda	Kelas 9	7 Orang (Pengembangan Model)
Widyaprada Ahli Pertama	Kelas 8	5 Orang (Fasilitasi & Supervisi)
Arsiparis Ahli Pertama	Kelas 8	2 Orang (Tata Kelola Kearsipan)
Pranata Komputer / Analis / Perencana / Keuangan	Kelas 8	4 Orang (Teknis & Fungsional)

Penelaah Teknis Kebijakan	Kelas 7	15 Orang (Analisis Kebijakan)
Pengolah Data dan Informasi	Kelas 6	16 Orang (Pengelolaan Sistem Data)
Pengadministrasi Perkantoran	Kelas 5	11 Orang (Dukungan Layanan Kantor)
Operator Layanan Operasional & Teknis	Kelas 1, 3, 5, 6, 7	21 Orang (Layanan Operasional & Sarpras)
Struktural (Kepala & Kasubbag)	Kelas 13 & 9	2 Orang (Pimpinan & Tata Usaha)

5.3 Persebaran Kelas Jabatan Aparatur

Distribusi jenjang kelas jabatan mencakup: Kelas Jabatan 1 (4 orang), Kelas Jabatan 3 (4 orang), Kelas Jabatan 5 (19 orang), Kelas Jabatan 6 (19 orang), Kelas Jabatan 7 (21 orang), Kelas Jabatan 8 (11 orang), Kelas Jabatan 9 (8 orang), Kelas Jabatan 11 (17 orang), dan Kelas Jabatan 13 (1 orang). Komposisi ini mencerminkan piramida keahlian yang solid dalam mengeksekusi mandat teknis penjaminan mutu dan urusan operasional perkantoran.



Gambar 1.6 Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Kelas Jabatan Tahun 2025

BAB VI: ISU STRATEGIS DAN FOKUS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Sebagai wilayah dengan karakteristik geografis kepulauan, pesisir pantai, hingga pegunungan Bukit Barisan, Provinsi Bengkulu menghadapi tantangan pemerataan mutu yang unik. BPMP memetakan sejumlah isu strategis sebagai prioritas intervensi program:

6.1 Pemerataan Akses Layanan Pendidikan dan PAUD 1 Tahun

Terdapat disparitas akses sarana dan prasarana pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah pedesaan, pesisir, serta daerah terpencil. Implementasi Wajib Belajar 1 Tahun PAUD menghadapi tantangan geografis dan biaya transportasi. Strategi penanganannya difokuskan pada perluasan

akses PAUD ramah anak melalui inovasi PAUD Mobile, pemanfaatan ruang publik/balai desa, dan penyediaan insentif daerah 3T.

6.2 Kualitas Pembelajaran Berbasis Budaya Lokal

Peningkatan mutu pembelajaran diarahkan pada penguatan kompetensi literasi dan numerasi serta penerapan kurikulum yang kontekstual dengan kearifan lokal Bengkulu. Evaluasi perkembangan peserta didik diterapkan melalui asesmen autentik, portofolio berkelanjutan, serta penciptaan iklim lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan.

6.3 Kapasitas dan Distribusi Pendidik Berkelanjutan

Kesenjangan pemenuhan guru bersertifikasi dan kompetensi pendidik diatasi melalui program pelatihan berkelanjutan, pendampingan praktisi, penguatan kemitraan dengan perguruan tinggi/LPTK di daerah, serta penyusunan skema sertifikasi pendidik yang adaptif terhadap dinamika lapangan.

6.4 Inovasi, Digitalisasi Adaptif, dan Sinergi Kemitraan

Digitalisasi tata kelola pendidikan diperkuat melalui integrasi basis data Rapor Pendidikan dan pemanfaatan platform pembelajaran digital. Untuk mengatasi kendala blank spot jaringan di wilayah terpencil, BPMP mendorong pendekatan teknologi berbasis offline-first. Di samping itu, penguatan sinergi lintas sektor dijalin bersama Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dispermades, BPS, komunitas mitra, dan sektor swasta.

BAB VII: PENUTUP

Dokumen Profil Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bengkulu ini menggambarkan komitmen kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola penjaminan mutu pendidikan yang profesional, transparan, dan berdampak nyata bagi ekosistem pendidikan di Provinsi Bengkulu. Melalui sinergi 5 Tim Kerja, dukungan 100 ASN berdedikasi, serta kemitraan lintas pemangku kepentingan, BPMP Provinsi Bengkulu siap mengawal terwujudnya layanan pendidikan bermutu tinggi bagi seluruh generasi penerus bangsa di Provinsi Bengkulu.